

## THR DAN GAJI KETIGA BELAS 2025

2025

PERBUP TABALONG NO. 10, BD 2025/NO. 10, 7 HLM.

### PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB Tabalong No. 9 Tahun 2024; PERBUP Tabalong No. 23 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada: a. Pejabat Negara; b. Pimpinan dan Anggota DPRD; c. PNS dan Calon PNS; d. PPPk; e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan f. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Maret 2025 dan ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.